



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# ANALISIS PASAL 5 DAN 8 UNDANG-UNDANG PKDRT NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH) pada Progam Studi Hukum Keluarga



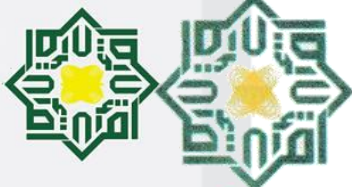
UIN SUSKA RIAU

Oleh

**EKO SETIAWAN**

**NIM: 21890215352**

**PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Eko Setiawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 21890215352  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : *“Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”*

Tim Penguji:

**Dr. H. Abu Anwar, M.Ag**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Afiq Budiawan, M.H**  
Penguji II/ Sekretaris

**Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A**  
Penguji III

**Dr. Hertina, M.Pd**  
Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

**Tanggal Ujian/ Pengesahan 05 / 05 / 2021**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: ***“Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”***, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Eko Setiawan  
 NIM : 21890215352  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 5 Mei 2021.

Penguji I,

**Dr. H. Abu Anwar, M.Ag**

NIP:19670817199402001

Tanggal: 7 Juni 2021

Penguji II,

**Dr. Afiq Budiawan, M.H.I**

NIDN. 2125128601

Tanggal: 7 Juni 2021

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga**

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**

**NIP. 196708221998031001**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

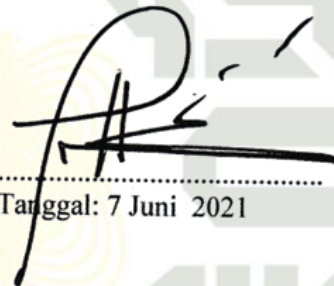
Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: ***“Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”***, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Eko Setiawan  
 NIM : 21890215352  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 5 Mei 2021.

Pembimbing I,

**Dr. Azni, S.Ag, M.Ag**  
 NIP. 197010102007011051


  
 Tanggal: 7 Juni 2021

Pembimbing II,

**Dr. Wahidin, M.Ag**  
 NIP. 197101081997031003

  
 Tanggal: 7 Juni 2021

Mengetahui,  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga**

  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
 NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

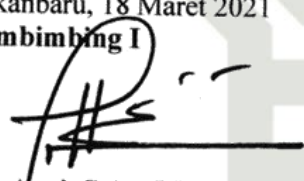
**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul *“Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”*, yang ditulis oleh:

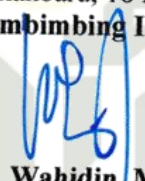
Nama : Eko Setiawan  
 NIM : 21890215352  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 Maret 2021  
 Pembimbing I

  
 Dr. Azni, S.Ag, M.Ag  
 NIP. 197010102007011051

Pekanbaru, 18 Maret 2021  
 Pembimbing II

  
 Dr. Wahidin, M.Ag  
 NIP. 197101081997031003

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag  
 NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOTA DINAS PEMBIMBING I**

**Dr. Azni, S.Ag, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SYARIF KASIM RIAU  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

PRIHAL : Tesis Saudara  
Eko Setiawan

Kepada Yth :

**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Suska Syarif Kasim Riau  
Di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Eko Setiawan  
NIM : 21890215352  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : ***"Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"***

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Pekanbaru, Kamis, 4 Sya'ban 1442 H

18 Maret 2021 M

Pembimbing I

**Dr. Azni, S.Ag, M.Ag**  
1970101020007011051

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## NOTA DINAS PEMBIMBING II

**Dr. Wahidin, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SYARIF KASIM RIAU  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

### NOTA DINAS

PRIHAL : Tesis Saudara  
Eko Setiawan

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Suska Syarif Kasim Riau  
Di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Eko Setiawan  
NIM : 21890215352  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : *"Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Pekanbaru, Kamis, 4 Sya'ban 1442 H  
18 Maret 2021 M

Pembimbing II

  
**Dr. Wahidin, M.Ag**  
197101081997031003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Setiawan

NIM : 21890215352

Tempat/Tanggal Lahir: Ponorogo, 10 Juli 1992

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul ***“Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam penulisan tesis ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi untuk memperbaiki karya ilmiah ini sesuai dengan aturan yang berlaku agar terhindar dari plagiat. Untuk menghindarkan pencabutan gelar akademik yang sedang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 Januari 2021

Hormat Saya,

Eko Setiawan  
21890215352





## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Teriring puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan secercah kekuatan dan kesempatan pada diri yang lemah ini, juga Ia yang memberikan harapan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Atas kehendak-Nya pula, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada ruh junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya yang loyal terhadap ajaran beliau.

Penelitian ini sengaja dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswi Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau Fakultas Syari'ah dengan program Studi Hukum Keluarga. Dalam penulisan ini, penulis berupaya meneliti dan menjelaskan sebuah permasalahan yang mana pokok masalah dalam penyusunan tesis ini berjudul: ***“Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”***

Penulisan tesis ini juga merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaiannya, penulis tentu mendapat hambatan, tantangan, dan godaan. Namun sekali lagi berkat pertolongan Allah SWT, dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan itu bisa terlewati, hingga penulisan tesis inipun bisa diselesaikan.

Terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini bukan berarti pula ini adalah akhir dari kreatifitas seorang mahasiswi. Apa yang penulis harapkan sebagai seorang mahasiswi adalah dapat menulis lebih banyak lagi dan dapat memperbaiki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi dari penulisan tesis ini. Maka kiranya penulis mengharap kritik dan saran guna memperbaiki kualitas mahasisiwi dalam menulis karya ilmiah.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan non moril dari keluarga penulis serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah kami Bapak Mujiono dan Ibu Jarmi selaku orang tua dan motivator terbesar bagi putranya, serta tak hentinya bertirakat mendoakan kami. Kemudian terimakasih kepada Kiki Dwi Setyaningsih, S.Pd. adik perempuan kami yang tidak bosan-bosannya mengingatkan dan memberi semangat untuk mengerjakan tesis ini.
2. (Alm) Al-Ustadz Dr. KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, (Alm) Al-Ustadz Saymsul Hadi Abdan, Al-Ustadz Hasan Abdullah Sahal, Al-Ustadz Dr. Amal Fathullah Zarkasyi dan Al-Ustadz Muhammad Akrim Mariyat sebagai Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang kami jadikan sebagai ayah ideologis sekaligus sosok inspirasi kami.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd sebagai PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mendukung sarana dan prasarana selama penulis melakukan penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal M, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak pernah bosan memberikan bimbingan, masukan dan saran yang sangat membantu serta selalu meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan, juga beliau lah yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penulisan tesis ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa tidak pernah bosan memberikan bimbingan, masukan dan saran yang sangat membantu serta selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini
7. Al-Ustadz Drs. H. Muhammad Ma'ruf Chumaidi, Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 7 sebagai ayahanda dan panutan kami yang senantiasa membimbing, memotivasi, dan menyemangati kami dengan setruman-setruman yang luar biasa.
8. Seluruh dewan guru pengabdian di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus pusat tempat mengemban ilmu semasa santri dan awal mengabdi, Dewan Guru PMDG kampus putra 5 Magelang terkhususnya staff BAAK kampus UNIDA MAGELANG, Dewan Guru PMDG kampus putra 12 SIAK dan Dewan Guru PMDG kampus Putri 7 atas dukungan, kepedulian dan do'a dalam kelancaran tugas-tugas kami.
9. Seluruh sahabat seperjuangan terkhusus Staff Pembangunan seluruh kampus Gontor, yang selalu mendo'akan dan memotivasi perjalanan kami.

Semoga penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi seluruh pembaca umumnya.

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Eko Setiawan

21890215352



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ASBTRAK.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	16
1. Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan).....	16
2. Hukum Islam .....	17
3. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004.....	19
C. Identifikasi Masalah .....	21
D. Pembatasan Masalah.....	22
E. Rumusan Masalah .....	22
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	23
1. Tujuan Penelitian .....	23
2. Manfaat Penelitian .....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kekerasan Seksual dalam Perkawinan (Marital Rape).....	25
1. Pengertian Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ( <i>Marital Rape</i> )...	25



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bentuk Kekerasan Seksual oleh Suami Terhadap Istri Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	34
2. Bentuk Kekerasan Seksual oleh Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam .....	36
B. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Suami Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam .....	40
1. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual oleh Suami Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	40
2. Ketentuan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri Menurut Hukum Islam .....	43
a. Pengertian Hukum Islam .....	43
b. Hubungan Seksual Suami Istri dalam Tinjauan Islam .....	47
c. Ketentuan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Suami terhadap Istri Menurut Hukum Islam .....	51
C. Penelitian Terdahulu.....	56

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	61
B. Sumber Data .....	61
1. Sumber Data Primer .....	61
2. Sumber Data Sekunder .....	62
C. Teknik Pengumpulan Data .....	62
D. Metode Analisis Data .....	63

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 24 terhadap Kekerasan Seksual oleh Suami terhadap Istri ( <i>Marital Rape</i> ).....	65
---	----





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	1. Perspektif Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual oleh Suami terhadap Istri ( <i>Marital Rape</i> ).....	65
	2. Perspektif Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 24 tentang Kekerasan Seksual oleh Suami terhadap Istri ( <i>Marital Rape</i> ).....	88
B	Perbandingan Hukum Islam dengan Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 mengenai <i>Marital Rape</i> .....	95
C	Pembahasan.....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>111</b>
A	Kesimpulan .....	111
B	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>114</b>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SINGKATAN

RUU	: Rancangan Undang-Undang
UND	: Undang-Undang Dasar
BPS	: Badan Pengawas Statistik
UNDESA	: <i>United Nation Development Economic And Social Affair</i>
Rikesdas	: Riset Kesehatan Dasar
Dikes	: Dinas Kesehatan
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKB	: Angka Kematian Bayi
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
YPHA	: Yayasan Pemantau Hak Anak
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
HAM	: Hak Asasi Manusia
YKP	: Yayasan Kesehatan Perempuan
PPU	: Putusan Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHA	: Konvensi Hak Anak
WHO	: World Health Organization
MA	: Mahkamah Agung
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUA	: Kantor Urusan Agama

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/1987, tanggal 10 September 1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Sad	Ṣ	Es titik di bawah
ظ	Dad	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	Zet titik di bawah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ك	‘Ayn	...’...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap**

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

**3. Ta’ *marbutah* di akhir kata**

**a. Bila dimatikan, ditulis h:**

هِبَة	Ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti Zakat, Shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal pendek

اَ (fathah)	ditulis a	ضَرَبَ	Ditulis	<i>Daraba</i>
اِ (kasrah)	ditulis i	فَهِمَ	Ditulis	<i>fahima</i>
اُ (dammah)	ditulis u	كُتِبَ	Ditulis	<i>kutiba</i>

## 5. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)  
جاهلية ditulis jāhiliyyah
- b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)  
يسعى ditulis yas'ā
- c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)  
مجيد ditulis majīd
- d. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)  
فروض ditulis furūd

## 6. Vokal Rangkap

- a. Fathah + ya mati, ditulis ai  
بينكم ditulis bainakum
- b. Fathah + wau mati, ditulis au  
قول ditulis qaulun

## 7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ diitulis a'antum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

أعدت                      ditulis      u'iddat  
لئن شكرتم                ditulis      la'in syakartum

8. **Kata sandang alif + lam**

- a. Bilia diikuti huruf qamariyah ditulis al-qamariyah

القرآن                ditulis      al-Qur'ān

القياس                ditulis      al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (el-)nya

الشمس                ditulis      asy-syams

السماء                ditulis      as-samā'

9. **Huruf Besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض                ditulis      zawi al-furūd

اهل السنة                ditulis      ahlu as-sunnah





## ABSTRAK

### **Eko Setiawan (2021): Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini didasari atas fakta bahwa pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih saja terjadi, termasuk kekerasan seksual. Komisi Nasional Perempuan pada tanggal 6 Maret 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan selama 1 tahun. Pada sisi lain bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan juga dianggap tabu untuk diungkap pada sebagian besar masyarakat karena dipandang masalah privasi. Namun saat terjadi gugatan cerai oleh seorang istri terhadap suami dalam kasus KDRT, pada saat proses mediasi dan persidangan di Pengadilan Agama faktanya terungkap bahwa kasus kekerasan fisik biasanya diiringi kasus kekerasan seksual. Terbukti pada data Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa selama 4 bulan awal di tahun 2021 ini setelah didalami selama proses mediasi dan persidangan, ternyata terdapat 67 kasus dari 901 kasus atau sekitar 7,44% terjadi kekerasan seksual.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah yang diharapkan dapat melindungi aspek kemanusiaan khususnya bagi kaum perempuan dalam sebuah perkawinan. Jauh sebelum itu syariat Islam telah mengatur tatanan pergaulan yang harmoni dalam sebuah perawinan.

Penelitian yang bersifat studi literatur (*library research*) telah menghasilkan simpulan bahwa pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 berbunyi secara tegas pada Hukum Positif di Indonesia kekerasan seksual dalam perkawinan atau dalam lingkup rumah tangga (*marital rape*) di larang secara tegas, dan termasuk dalam ranah hukum pidana. Sejalan dengan ini hukum Islam memandang kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan sekaligus prinsip *syara'*.

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara jelas menyebutkan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam Islam menikmati hubungan seksual (*pleasure*) merupakan salah satu tujuan pernikahan dan hal itu merupakan hak dan kewajiban bagi suami-istri. Kedua belah pihak harus saling memperhatikan hak tersebut terhadap pasangannya. Namun, mengabaikan kenikmatan seksual pasangan tidak termasuk dalam bentuk *marital rape* yang ringan atau makruh hukumnya. Selain itu, hukum Islam pun melarang tegas anal seks serta hubungan seks ketika haid yang menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak dilarang, asalkan disetujui pasangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Eko Setiawan (2021) : The Analysis of Articles 5 and 8 of the PKDRT Constitution Number 23 Year 2004 on Marital Rape Law Reviewed from an Islamic Law Perspective**

This research is based on the fact that in reality domestic violence (KDRT) still occurs, including sexual violence. The National Commission for Women on March 6, 2020, recorded 431,471 cases of violence against women for 1 year. On the other hand, sexual violence in marriage is also considered taboo to be disclosed to most people because it is seen as a matter of privacy. However, when a divorce lawsuit occurs by a wife against her husband in a domestic violence case, during the mediation and trial process at the Religious Courts, the fact is revealed that cases of physical violence are usually accompanied by cases of sexual violence. It is proven in Pekanbaru City Religious Court data that during the first 4 months in 2021, after being investigated during the mediation and trial process, it turned out that there were 67 cases out of 901 cases or around 7.44% of sexual violence. The Indonesian government has issued Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which is expected to protect the humanitarian aspect, especially for women in a marriage. Long before that, Islamic law had arranged a harmonious social order in a marriage. Research that is a literature study (library research) has resulted in the conclusion that Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in Article 5 reads explicitly on Positive Law in Indonesia, sexual violence in marriage or within the household (marital rape). ) is strictly prohibited, and is included in the realm of criminal law. In line with this, Islamic law views sexual violence in the household as an act of persecution that interferes with the individual rights of others which contains harm, contradicts as well as the principles of syara'. Article 8 of Law Number 23 of 2004 clearly states the form of sexual violence in the household. In Islam enjoying sexual relations (pleasure) is one of the goals of marriage and it is a right and obligation for husband and wife. Both parties must pay attention to the rights of their partners. However, ignoring a partner's sexual pleasure is not included in the form of marital rape which is light or legally makruh. In addition, Islamic law also strictly prohibits anal sex and sexual intercourse during menstruation which causes adverse effects on health. Meanwhile, in Law Number 23 of 2004 it is not prohibited, as long as it is approved by the partner.

UIN SUSKA RIAU



## ملخص

إيكو سيتياوان (٢٠٢١): التحليل في المادتين ٥ و ٨ من دستور القضاء على العنف المنزلي رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ عن قانون العنف

الجنسي في الزواج منظور من وجهة نظر الشريعة الإسلامية

يستند هذا البحث إلى حقيقة أن العنف المنزلي (لا يزال يحدث في الواقع ، بما في ذلك العنف الجنسي . سجلت اللجنة الوطنية للمرأة في ٦ مارس ٢٠٢٠ ، ٤٣١٤٧١ حالة عنف ضد المرأة لمدة عام. من ناحية أخرى ، يعتبر الكشف عن العنف الجنسي في الزواج من المحرمات لمعظم الناس لأنه يُنظر إليه على أنه مسألة خصوصية. ومع ذلك ، عندما ترفع الزوجة دعوى طلاق ضد زوجها في قضية عنف منزلي ، أثناء عملية الوساطة والمحاكمة في المحاكم الدينية ، يتم الكشف عن حقيقة أن حالات العنف الجسدي عادة ما تكون مصحوبة بقضايا عنف جنسي. ثبت في بيانات المحكمة الدينية لمدينة بيبكانبارو أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢١ ، بعد التحقيق أثناء عملية الوساطة والمحاكمة ، تبين أن هناك ٦٧ قضية من أصل ٩٠١ قضية أو حوالي ٧.٤٤٪ من العنف الجنسي. أصدرت الحكومة الإندونيسية القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن القضاء على العنف المنزلي والذي من المتوقع أن يحمي الجانب الإنساني ، وخاصة بالنسبة للمرأة في الزواج. قبل ذلك بوقت طويل ، رتب الشريعة الإسلامية نظامًا اجتماعيًا متناغمًا في الزواج. أسفر البحث الذي يعد دراسة أدبية (بحث في المكتبة) عن استنتاج مفاده أن القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ بشأن القضاء على العنف المنزلي في المادة ٥ يقرأ صراحة القانون الإيجابي في إندونيسيا ، والعنف الجنسي في الزواج أو داخل الأسرة (الاغتصاب الزوجي) . محظور تمامًا ، وهو مدرج في مجال القانون الجنائي. تماشيًا مع هذا ، تنظر الشريعة الإسلامية إلى العنف الجنسي في الأسرة على أنه فعل اضطهاد يتعارض مع الحقوق الفردية للآخرين الذي يحتوي على ضرر ويتعارض مع مبادئ سياسة حقوق الإنسان. المادة ٨ من القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ بوضوح على شكل العنف الجنسي في الأسرة. إن العنف الجنسي (اللذة) في الإسلام هدف من أهداف الزواج وحقوق واجب للزوج والزوجة. يجب على الزوجين احترام حقوق شركائهم. ومع ذلك ، فإن تجاهل المتعة الجنسية للشريك لا يتم تضمينه في شكل العنف الجنسي. الخفيف أو المكروه قانونًا. بالإضافة إلى ذلك ، تحظر الشريعة الإسلامية بشكل صارم ممارسة الاتصال الجنسي أثناء الحيض مما يسبب آثارًا ضارة بالصحة. وفي الوقت نفسه ، في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٤ ، لم يتم حظره ، طالما تمت الموافقة عليه من قبل الشريك.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Di antara potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah potensi seksual, termasuk nafsu seks. Nafsu syahwat diberikan dalam proses penciptaan manusia.<sup>1</sup> Oleh karenanya nafsu menjadi unsur yang naluriah dan alami bagi manusia. Sebagai naluri, nafsu seks ini tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi dan perilaku seksual. Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks terpenuhi tanpa terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual, sehingga dalam pelaksanaannya lebih memiliki nilai tersendiri daripada sekedar sebuah pelampiasan.

Dalam Islam, perkawinan merupakan ibadah, dan seks dalam sebuah perkawinan merupakan ladang pahala yang besar. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.<sup>2</sup>

Akan tetapi dalam beberapa kasus terjadi pemaksaan hubungan seks dalam perkawinan, yaitu yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi normal menurut norma agama dan sosial. Pemaksaan hubungan seksual dalam

<sup>1</sup> Hamim Ilyas, *Orientasi Seksual dari Kajian Islam dalam Sinta Nuriyah A. Rahman Islam dan Kontruksi*, cet 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 81.

<sup>2</sup> Abdurahman Thalib al-jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*, Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009, hlm. 84.

perkawinan biasanya menjurus pada pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau istri.

Padahal, dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa:<sup>3</sup> Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentukrumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal.

Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam sebuah rumah tangga bisa terjadi sebuah kekerasan. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas actual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang KDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan UU PKDRT yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

<sup>4</sup> Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000, hlm. 28.

<sup>5</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para korbannya Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, disebutkan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".<sup>6</sup>

Persoalan *maritel rape* sudah menjadi agenda hukum di berbagai negara. Proses sosialisasinya selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi perumusan hukum tersebut. Sehingga bukan saja para ahli agama juga ahli hukum di Indonesiapun diusik oleh persolan ini. Dalam waktu 15 tahun kalangan ahli hukum di Amerika berdebat dengan kelompok-kelompok anti kekerasan terhadap perempuan, sebelum akhirnya mensyahkan *maritel rape* sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1991.<sup>7</sup>

Sementara di Inggris sudah lebih dahulu memperluas arti perkosaan terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan bertentangan dengan kemauannya. Perbuatan tersebut dapat di hukum maksimal seumur hidup.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>7</sup>Hester, M. Liz Kelly dan Jill Radford, *Women Violence and Male Power*, Philadelphia: open university press, 1992, hlm.32

<sup>8</sup>Bogart, K. dan Yllo K., *Feminist Perspectives on Wife Abuse*, London; sage publication, 1988, hlm.12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks Indonesia, upaya menggulirkan *marital rape* harus terlebih dahulu meretas jarak psikologis yang diantarkan oleh istilah dari bahasa dari Barat. Belum lagi meluruskan tuduhan bias feminis yang selalu diartikan perlawanan terhadap laki-laki daripada upaya memanusiakan kaum perempuan secara universal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah tercantum aturan yang jelas, terkait dengan *marital rape* kekerasan seksual terhadap perempuan dalam lingkup pernikahan. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri jelas telah melanggar hak seorang istri, aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri tidak akan mendatangkan keselarasan dalam mendapatkan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan dan pemaksaan sama halnya dengan penindasan.<sup>9</sup>

Beberapa contoh bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Suami memaksa istri untuk berhubungan seks saat istri sedang dalam kondisi sakit atau sedang haid.
2. Suami memaksa untuk berhubungan seksual dengan gaya yang tidak disukai istri atau istri merasa jijik melakukannya.
3. Suami memaksa istrinya menonton film porno dan memaksa istri melakukan adegan yang ada dalam film tersebut.

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4. Suami memaksa berhubungan seks dengan istrinya dengan menggunakan benda lain ke dalam kemaluan istri.
5. Suami tidak memberikan kebutuhan seks bagi istri atau istri tidak melayani kebutuhan seks suami karena alasan wanita idaman lain (WIL).
6. Suami memaksa istri berhubungan seks dengan pria lain.<sup>10</sup>

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan<sup>11</sup> yang diluncurkan tanggal 6 Maret 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan di ranah personal masih menempati angka tertinggi. Pengadilan Agama menyebutkan 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung dengan perceraian. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal (KDRT/RP), kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus.

Sacara faktual kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri sering diabaikan atau tidak terungkap ke permukaan, karena terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa masalah seksual antara suami dan istri adalah masalah privat yang menjadi tanggung jawab personal suami dan istri, sehingga banyak korban, yaitu istri, memilih untuk diam dan tidak mengadakan pemaksaan seksual oleh suami kepada pihak lain. Apalagi ada

<sup>10</sup>Muyassarotussolichah dalam Hasmila. 2017. *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UIN Alauddin Makassar, hlm. 4-5

<sup>11</sup>Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-cata>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

persepsi yang salah atas nama agama untuk melegitimasi tindakan suami yang meminta istri untuk melayani kebutuhan seksualnya.<sup>12</sup>

*Marital rape* masih merupakan masalah serius yang kurang mendapat perhatian di masyarakat dikarenakan alasan bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga sering ditutupi dan sering dianggap wajar karena adanya keyakinan tentang bolehnya memperlakukan istri sekehendak suami.<sup>13</sup> Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat juga menjadi salah satu penyebabnya.<sup>14</sup> Ditambah lagi banyak kaum pria yang menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Secara eksplisit (tegas) Islam tidak mengatur tentang kekerasan seksual suami terhadap istri atau *marital rape*. Namun secara normatif, Islam sangat mengidealkan pola yang serasi dan setara antara laki-laki dan perempuan, Islam juga mengangkat nilai dan kedudukan hubungan seksual yang sehat antara suami istri. Persetubuhan yang sehat antara suami istri adalah yang dikomunikasikan terlebih dahulu, dinikmati dan dikehendaki kedua pihak.<sup>15</sup> Ayat-ayat dan hadist-hadist yang secara tekstual potensial untuk dijadikan justifikasi *marital rape* terbilang cukup banyak dan sangat sering

<sup>12</sup>Syaifuddin, M. Irfan. 2018. *Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat*. IAIN Sumakarta: Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 3, Nomor 2, 2018

<sup>13</sup>Jayanti, Budi. 2016. *Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Palopo

<sup>14</sup>Hasmila. 2017. *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. hlm.4

<sup>15</sup>Luthfiatun Nafisah. 2015. *Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Jember. hlm.4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

digunakan oleh masyarakat. Diantaranya yang dikaitkan pada penafsiran ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:<sup>16</sup>

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُكُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

*Istri-istri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah (amal-amal baik) untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya (pada hari akhirat kelak) dan berilah khabar gembira wahai Muhammad) kepada orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 223).*

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa istri “laksana sawah ladang” yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki. Dalam ayat ini terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan dipaksa. Jadi harus ada interaksi antara keduanya yang diharapkan dapat membuat lahan itu subur dan produktif.

Artinya, seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap “ladang” yang diamanati dan diberkahi oleh Allah. Ladang tersebut perlu dipupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur. Hubungan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan adalah ibadah. Hal inilah

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007

yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap pasangan.<sup>17</sup>

Konsep perkawinan dalam wacana Islam, dapat dipahami sebagai akad yang menghalalkan, dan juga hubungan seksual yang sebelumnya diharamkan sebagai tindak *jarimah zina*. Meskipun sebenarnya, dalam hukum pidana Islam telah ada konsep *ta'zir* yang memungkinkan bagi hakim untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam *nash*. Namun, konsep *marital rape* sulit diterima oleh ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep *tamlik* (pemilikan suami atas istri sendiri) dalam pernikahan. Dalam Islam juga dikenal sebagai konsep *nushuz* yang menghalalkan suami untuk menghukum istrinya ketika istrinya dianggap durhaka. Islam selalu memandang al-Qur'an sebagai sumber hukum, tetapi untuk menjadi hukum positif, hukum Islam adalah perbuatan yang rasional (obyektifikasikan) dan untuk diwujudkan dalam perbuatan yang rasional (*wertrational*).<sup>18</sup>

Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 34 memberi penjelasan:<sup>19</sup>

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah*

<sup>17</sup>Andy Dermawan, *Marital dalam Prespektif Al Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 34.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 95.

<sup>19</sup>Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam akhir ayat tersebut dinyatakan “janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”, artinya, apabila seorang istri taat kepada suaminya dalam semua apa yang dikehendaki suaminya pada diri si istri sebatas yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan bagi si suami untuk menyusahkannya, dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya.<sup>20</sup>

Terkait dengan hal tersebut berikut ini penulis tampilkan bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara parsial menjelaskan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terkait dengan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yakni: Pasal 1 ayat 1 pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

<sup>20</sup>Tafsir Surat An Nisa ayat 34. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>21</sup>

Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Dalam pasal 2 pada ayat 2 dijelaskan lingkup rumah tangga meliputi: suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya pada pasal 3 ditegaskan bahwasanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas Penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban.<sup>23</sup>

Sedangkan yang menjadi inti dalam pembahasan ini adalah pasal 5 pada bab larangan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwasannya setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 2

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 3

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>24</sup>

Kemudian spesifikasi tentang poin huruf c (kekerasan seksual) dijelaskan pada pasal 8 yakni: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>25</sup>

Sanksi hukum terhadap perbuatan tersebut dijelaskan pada pasal 47 Undang-Undang PKDRT yang menegaskan bahwasanya “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”<sup>26</sup>

Pemaparan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 termuat dalam Bab 1 (ketentuan umum) pada pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk perbuatan terutama kepada perempuan

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 5

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 6

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm.21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Dari penjelasan tersebut dinyatakan bahwasannya kekerasan seksual merupakan bagian dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>27</sup>

Kemudian pada pasal 2 dijelaskan ruang lingkup rumah tangga itu meliputi suami, istri, anak, orang-orang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. pada pasal 2 tersebut dijelaskan bahwasanya istri termasuk dalam lingkup rumah tangga yang bisa saja menjadi korban kekerasan dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri dalam bentuk pemaksaan untuk berhubungan intim termasuk dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>28</sup>

Kemudian pada pasal 5 memuat tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, pasal ini menyatakan bahwasanya kekerasan seksual termasuk dari bagian dari larangan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi kasus yang kompleks dan sulit untuk diungkapkan juga karena ada banyak asumsi dan persepsi yang saling terkait dengan budaya dan pemahaman agama serta aspek biologi, psikologi, ekonomi dan politik. Misalnya aspek ekonomi: adanya

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan ekonomi istri terhadap suami telah memaksa istri untuk menerima tindakan kasar dari mereka yang telah memberikan nafkah kepada mereka.<sup>30</sup>

Penjelasan tentang larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 8 yang menyatakan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual tersebut diantaranya adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Jadi pemaksaan suami untuk berhubungan intim terhadap istri yang disebut dengan istilah *marital rape* merupakan salah satu bentuk dari larangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang tersebut dalam pasal 5 dan memiliki sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 47 UU PKDRT.<sup>31</sup>

Walaupun perempuan sudah menjadi korban dan objek kekerasan ia masih dipojokkan sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab atas kekerasan yang ia derita. Terlebih lagi perkawinan dianggap sebagai legitimasi resmi kekuasaan laki-laki atas perempuan secara jiwa maupun raga. Karena sifatnya yang otonom, laki-laki merasa berhak melakukan apa saja termasuk memaksa istri berhubungan seksual tanpa ada persetujuannya terlebih dahulu. Karena ada anggapan bahwa dalam berhubungan seksual seorang istri harus tunduk sepenuhnya kepada suami, dengan alasan ini maka

<sup>30</sup>E. Kristi Poerwandari dalam Alfitri Ph.D. 2018. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Tantangan Implementasinya di Indonesia*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

<sup>31</sup>*Ibid.* h.6

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

istri tidak dapat mengadakan suaminya bila terjadi hubungan seksual dengan motif perkosaan.

Faktanya memang menurut Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Zosmel Zuly, pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru seorang Istri jarang mengungkapkan kekerasan dalam hubungan seksual. Namun selama 4 bulan awal di tahun 2021 ini, setelah didalami selama proses mediasi dan persidangan, ternyata terdapat 67 kasus dari 901 kasus atau sekitar 7,44% terjadi kekerasan seksual yang dilakukan suami, dan menjadi salah satu penyebab gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Data ini tentunya cukup mengejutkan bahwa kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri sebagian besar diikuti oleh kekerasan seksual.<sup>32</sup>

Sudah sepantasnya kasus kekerasan seksual dalam perkawinan diungkap dengan jelas, dan ini mengharuskan keberanian dari seorang Istri. Karena suami yang memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks bahkan cenderung dianggap sebagai sebuah tindakan pemerkosaan. Apabila ini dibiarkan terus menerus akan berdampak buruk terhadap perempuan dan dapat melukainya baik secara fisik maupun psikisnya. Dengan demikian secara fenomenal bukan lagi sebagai problem antar individu tapi dipandang sebagai problem sosial dan melanggar hak asasi manusia.

<sup>32</sup>Zosmel Zuly, Sekretaris Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, tanggal 24 Juni

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Selama ini orang memahami kekerasan sebatas perbuatan perilaku fisik yang kasar, keras, dan bengis sebaliknya perilaku menekan dan menindas secara psikis itu tidak dianggap sebagai kekerasan. Sedangkan perbuatan marital rape ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun secara psikis. dan dampak dari perbuatan marital rape seperti yang telah diuraikan diatas mengakibatkan pengaruh yang besar pada korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis.

Berdasarkan pemaparan di atas tentang kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan suami terhadap istri untuk berhubungan intim, dan pernyataan yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 yang mengkategorisasikan kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam bentuk pemaksaan oleh suami untuk berhubungan intim dengan istri termasuk dalam larangan kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tema *Analisis Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan nash-nash Al-Quar'an dan Al-Hadist serta pendapat para ulama fiqih yang memiliki kontradiktif terhadap undang-undang tersebut melalui analisis dan interpretasi secara komprehensif dan holistik sehingga akan muncul kepermukaan sebuah kesimpulan dalam bentuk konsep hukum terhadap kasus *marital rape*.



## B. Penegasan Istilah

### 1. *Marital Rape* (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)

*Marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan, *rape* yang berarti perkosa.<sup>33</sup> Ditinjau dari sudut terminologi, *marital rape* diartikan hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar. Menurut Hasbianto, *marital rape* adalah pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.<sup>34</sup>

Sedangkan Farkha Cicik<sup>35</sup> mengklasifikasikan *marital rape* dalam tiga kategori yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.

Berdasarkan pengertian tentang *marital rape* yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan tentang bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut, yaitu hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai setengah dari harga laki-laki. Ini pertandadari perlakuan hukum yang sangat

<sup>33</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 375.

<sup>34</sup> Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.

<sup>35</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminatif. Oleh Islam pandangan dan praktik misogynis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan duniawi. Islam dengan cara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.<sup>36</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>37</sup> Menurut Hasby Ash Shiddieqie menyatakan bahwa hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dan pada fiqh Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>38</sup>

Istilah hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dan Fiqh Islam atau syari'at Islam yang bersumber kepada al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para sahabat dan tabi'in. Lebih jauh Hasby menjelaskan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.<sup>39</sup>

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul

<sup>36</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, hlm. 35.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2000, hlm. 9.

<sup>38</sup>Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 44.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 112.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>40</sup>

Hukum Islam dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Untuk merealisasi ini dan dalam kapasitasnya yang lebih besar, bisa melalui proses *siyash syariyyah*, dengan produk *qanun* atau perundang-undangan *Qânûn* (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, atau kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih.<sup>41</sup>

Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini disebabkan menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti *munakahat*, *wirasah*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayat* atau *ukubat*, *al ahkamas-sultoniyyah*, *syiar*, dan *mukhasshamat*.<sup>42</sup>

Susunan hukum *muamalah* dalam arti luas itu adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

<sup>40</sup>Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. hlm.24

<sup>41</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm.10

<sup>42</sup>Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 112

<sup>43</sup>*Ibid*





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Hukum Privat:

- 1) *Munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.
- 2) *Wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan.
- 3) Muamalah dalam arti yang khusus. Mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya.

#### b. Hukum Publik

- 1) *Jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah takzir*.
- 2) *Al-ahkam Assultonijyah* membicarakan soal-soal yang berpusat kepada negara, ke pemerintah.
- 3) *Siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungannya dengan pemeluk agama dan negara lain.
- 4) *Mukshshonat* mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.

### 3. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004

Delik hukum undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan kekerasan seksual dalam lingkup rumah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga tertuang dalam Bab III (larangan Kekerasan Dalam Rumah tangga) dan lebih spesifik dijelaskan pada pasal 5 dan pasal 8 yakni:

Dalam pasal 5 dijelaskan:<sup>44</sup>

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis.
- c. Kekerasan seksual.
- d. Penelantaran rumah tangga

Dalam pasal 8 dijelaskan:<sup>45</sup> Kekerasan seksual seksual sebagaimana yang maksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap oarang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Sanksi hukum dalam pasal 46 dijelaskan:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, pasal 5

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, pasal 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>46</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut yang menjadi landasan dasar diangkatnya penelitian ini adalah delik hukum pada pasal 5 pasal 8 yang secara lugas menjelaskan larangan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan dalam hal ini istri merupakan bagaian dari lingkup rumah tangga yang menjadi objek kekerasan seksual tersebut dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh istri terhadap suami juga termasuk dalam delik hukum pada pasal tersebut. Akan tetapi yang menjadi spesifikasi penelitian ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri (marital rape) dan sanksi hukum terhadap tindakan tersebut pada pasal 46.

### C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasikan dalam hal ini sebagai berikut:

- 1 Konsep Hukum Islam terhadap tindakan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*Marital Rape*).
- 2 Konsep Hukum Undang-Undang PKDRT terhadap tindakan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*Mariral Rape*).
- 3 Sanksi Hukum Islam terhadap tindakan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*Marital Rape*)

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm.21





- 4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait dengan pelarangan terhadap tindakan *Marital Rape*.
- 5 Perspektif hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam kaitannya dengan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*Marital Rape*).

#### **D. Pembatasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang teridentifikasi dalam pembahasan ini maka penulis membatasi penelitian ini pada analisis hukum kekerasan seksual dalam perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta tinjauan dari Perspektif Hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah hukum kekerasan seksual dalam perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT?
2. Bagaimanakah hukum kekerasan seksual dalam perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ditinjau dari perspektif hukum Islam?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis hukum kekerasan seksual dalam perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- b. Menganalisis hukum kekerasan seksual dalam perkawinan pada Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik penelitian dapat bermanfaat sebagai literatur akademik yang diharapkan dapat memberikan paradigma baru terhadap pemahaman publik terkait permasalahan hukum tindak kekerasan seksual oleh suami terhadap istri yang termuat pada pasal 5 dan 8 dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004.
- b. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan bagi penulis.
- c. Dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum Islam yang mengindahkan bentuk kekerasan-kekerasan seksual suami terhadap istri.
- d. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

UIN SUSKA RIAU

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, maka akan dijelaskan secara garis besarnya penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Membahas tentang landasan teori, yang meliputi: definisi Marital rape, Ketentuan Hukum pidana terhadap tindakan *Marital Rape*, Penelitian terdahulu, dan Instrumen penelitian (indikator variabel)

**BAB III** Merupakan metode penelitian, yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, waktu penelitian, dan desain rancangan,

**BAB VI** Terdiri dari gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan pembahasan

**BAB V** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)

##### 1. Pengertian *Marital Rape* (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>47</sup>

Berangkat dari pemaparan pasal 1 dalam Undang-undang No 23 Tahun 2, unsur penting dari perkosaan adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan di dalamnya.<sup>48</sup> Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan haruslah dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak.

Jadi tindakan pemaksaan berhubungan seksual oleh suami terhadap istri yang lebih dikenal dengan istilah *marital rape*, Dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan tindakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekwensi berupa sanksi pidana dan termasuk dalam lingkup KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

<sup>47</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Ketentuan Umum Pasal 1* Nomor 23 Tahun 2004

<sup>48</sup>Ardiansyah. 2016. *Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016. hlm.82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan *marital rape*, adapun pengertian dari *marital rape* itu sendiri beragam. Pertama menurut Nurul Ilmi Idrus, dalam laporan penelitiannya tentang masyarakat bugis, melalui pengalaman para responden yang menjadi korban *marital rape*, mendefinisikan bahwa *marital rape* adalah hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri.<sup>49</sup> Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkannya kedalam 3 bagian, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>50</sup>

Selain itu pengertian *marital rape* sebagaimana yang disampaikan oleh Bergen yang dikutip oleh Siti Aisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri tidak sadar.<sup>51</sup> Kemudian Elli Nur Hasbianto memberikan pengertian *marital rape* sebagai kekerasan terhadap istri dalam bentuk pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual, dan pemaksaan seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri.

<sup>49</sup>Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan *Ford Foundation*, 1999, hlm. 25-38.

<sup>50</sup>Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan *The Ford Foundation*, 1998, hlm.24-25

<sup>51</sup>Siti 'Aishah yang di kutip Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2007, hlm. 12, dan selengkapnya lihat Raquel K Bergen, *Marital Rape*. [http:// www.vaw. Umn.Edu/vaunet/mrapehtml](http://www.vaw.Umn.Edu/vaunet/mrapehtml)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *marital rape* adalah perbuatan pemerkosaan terhadap seorang istri karena ada unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan, yang berdampak buruk terhadap istri baik dari segi fisik maupun psikis. *Marital rape* dianggap perbuatan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana, dan memiliki potensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

*Marital rape* pada kenyataannya tidak dalam satu bentuk atau model tertentu, namun terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri (Susilo, 2013) yaitu:<sup>52</sup>

1. *Battering rape*: suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik sekaligus saat memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa istri bahkan terluka secara fisik akibat pemaksaan yang dilakukan suami pada saat istri tidak siap atau tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual. *Marital rape* pada umumnya terjadi dalam bentuk ini.
2. *Force-only rape*: suami memaksa atau mengancam istri sebelum berhubungan seksual. Pemaksaan atau ancaman ini dilakukan agar istri mau melayani hasrat suami. Jika suami telah melampiaskan hasrat seksual kepada istrinya, maka suami tidak melakukan kekerasan fisik. Namun bila suami tidak terpenuhi hasratnya, mungkin bisa melakukan kekerasan fisik kepada istri.

<sup>52</sup>Susilo, M. E. 2013. *Islamic Perspective on Marital Rape*. Jurnal Media Hukum, 20 (2)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Obsessive rape*: istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk perilaku *sadistic* dalam melakukan hubungan seksual. Perilaku *sadistic* dalam hubungan seksual, yaitu suami melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan menggunakan alat tajam yang melukai istri untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan penderitaan istri atas kekerasan tersebut.

Dalam pembagian lain, beberapa kondisi yang dianggap marital rape adalah sebagai berikut:

- a. Bersetubuh di Dubur.

Islam melarang terjadinya persetubuhan melalui dubur. Sebab dubur adalah tempat yang kotor dan membahayakan. Menyetubuhi istri pada dubur dapat dipersamakan dengan *liwath* (homoseks/sodomi). Oleh karena itu, sudah seharusnya agama melarangnya demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sebagai mana larangan tersebut dilarang oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang menceritakan tentang perilaku kaum nabi Luth AS:<sup>53</sup>

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لِفَاعِحُونَ فَاخِشُوا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh satu orangpun sebelum kalian di alam ini.” (Q.S. al-Ankabut [29]: 28).

<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2012

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, larangan tersebut juga disabdakan oleh Rasulullah SAW:<sup>54</sup>

“Janganlah kamu setubuhi istrimu di duburnya” (HR. Ahmad, tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Tentang masalah menyetubuhi istri di duburnya ini, beliau SAW juga mengatakan:<sup>55</sup>

“Hal itu termasuk liwath yang kecil” (HR. Ahmad dan Nasa’i) Rasulullah SAW bersabda:<sup>56</sup>

“Dilaknat, orang yang mencampuri istri dari duburnya.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Tarmidzi)

b. Bersetubuh di Masa Haid dan Nifas.

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam dan paling lama lima belas hari. Sedangkan, yang normal adalah enam atau tujuh hari. Dalam menjalani masa haid ini, wanita dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: Wanita yang baru menjalani haid, wanita yang telah terbiasa menjalaninya, dan wanita yang mengalami keluarnya darah istihadhah.<sup>57</sup>

Sedangkan, nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Ia juga merupakan darah haid yang tertahan karena proses

<sup>54</sup>Toha Andiko. 2014. *Fiqh Kontemporer*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, hlm.162

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm.163

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm.163

<sup>57</sup>Qardhawi, Yusuf, *Hâdî al-Islâm Fatâwâ Mu’âsirah*, terj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid I, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 122

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehamilan. Takaran maksimal bagi keluarnya darah nifas ini adalah empat puluh hari.<sup>58</sup>

Seorang istri tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haid atau nifasnya, sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى لَا فَاعِلٌ لِّلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ  
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ  
الْمُؤْمِنِينَ

*“Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah kotoran (najis).” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 222-223).*<sup>59</sup>

Berhubungan seks tatkala haid atau nifas selain dilarang menurut syariat juga terlarang menurut medis. Saat perempuan menstruasi, serviks (leher rahim) terbuka dan saluran air seni seolah ikut membuka yang menyebabkan vagina mudah lecet. Kondisi ini memperbesar peluang masuknya tamu tak diundang yaitu virus dan bakteri. Bila

<sup>58</sup>Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, *AlJami’Fii Fiqhi An-Nisa’*, terj.M. Abul Ghoftar E.M., Fiqih Wanita. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 420

<sup>59</sup>Al-Qur’an dan Termjemahnya, Kementerian Agama RI, 2012



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan seks tatkala normal saja sang tamu tak diundang itu suka nyelonong, apalagi ketika sedang haid. Virus dan bakteri akan lebih mudah masuk dan bereaksi negatif terhadap vagina.<sup>60</sup>

c. Seks Oral

Pada dasarnya di dalam Islam, seks oral memang tidak sepenuhnya dihukumi menyimpang, namun juga bukan berarti diperbolehkan secara mutlak. Persoalannya memang masih diperdebatkan. Tetapi, ada satu titik sepakat yang dapat kita garisbawahi, bahwa segala bentuk dan cara berhubungan seks sah-sah saja, sebatas yang tidak dilarang.

Oral seks adalah aktivitas seks dimana organ kelamin mendapatkan perlakuan dari organ mulut, dengan ciuman misalnya. Dan biasanya ini dilakukan sebagai pemanasan agar hubungan seks dapat mencapai orgasme. Namun, oral seks dapat berubah menjadi sebuah penyimpangan atau bersifat patologis, tatkala seseorang hanya mampu mendapatkan orgasme dengan oral seks. Jika berkaitan dengan tercium atau tertelannya madzi, maka oral seks haram hukumnya.<sup>61</sup>

Hal ini disebabkan madzi termasuk najis ringan dan berbeda dengan mani yang menurut mayoritas ulama tidak dianggap najis. Ketika pemanasan berlangsung, tentu saja dengan demikian kedua belah pihak akan terangsang. Dan secara alami kemaluan akan mengeluarkan cairan bening yang dalam istilah fikih disebut dengan madzi. Walaupun madzi

<sup>60</sup> Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*. Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006, hlm. 107.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm.110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya termasuk najis ringan, tapi bagaimanapun setiap najis hukumnya adalah haram.<sup>62</sup>

d. Seks Sadistik (Kasar)

Seks sadistik merupakan penyimpangan seks di mana kepuasan seks diasosiasikan dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa, pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara, atau kepribadian yang psikopatis.<sup>63</sup>

Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Hal ini menyalahi konsep bergaul dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Islam telah mewanti-wanti melalui kewajiban suami istri untuk bergaul dengan cara yang *ma'ruf* dan larangan menzalimi orang lain. Termasuk apapun yang menjadi latar belakang dan juga tujuan melakukan kekerasan seksual, tetap saja itu merupakan perbuatan zalim yang diharamkan dalam Islam.

e. Ketidakjujuran Dalam Bersetubuh (Adanya Penyakit)

Ketidakjujuran atau perihal ketidakterbukaan dalam berhubungan seksual, ketika seorang suami yang memiliki penyakit menular yang tersembunyi dimana pasangan sulit mengetahuinya terutama indikator

<sup>62</sup> Abu Umar Basyir. *Op Cit*. hlm. 135

<sup>63</sup> *Ibid*. hlm. 114



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, seperti HIV/Aids. Bilamana ia tetap saja mengabaikan dan tidak peduli akan dampaknya bagi kesehatan seorang istri, maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kekerasan seksual. Hal ini dapat mengancam jiwa si istri dan juga keturunan. Tentu itu dilarang dalam agama Islam. Karena salah satu maksud disyariatkannya larangan tersebut adalah untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl).<sup>64</sup>

Dari berbagai penyimpangan seksual di atas tentunya dilarang dalam ajaran Islam. Namun, perihal sanksi terhadap pelaku secara eksplisit tidak diakomodir dengan jelas dalam nash Alquran maupun hadis. Dalam hal ini mungkin perilaku penyimpangan seksual tersebut terjadi dalam ruang privat dimana yang terjadi pada intinya adalah pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Suatu konsekuensi yang harus diemban oleh keduanya (suami-istri) sebagai orang mukallaf untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Namun demikian bukan berarti tidak ada sanksi\bagi pelaku kekerasan tersebut walaupun ia adalah seorang suami. Perbuatan tersebut yang pasti adalah melanggar perintah Allah Swt dimana ia telah melakukan perbuatan dosa yang harus dipertanggungjawabkan.

Marital rape ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun secara psikis. dan dampak dari perbuatan *marital rape* seperti

<sup>64</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. xi.



yang telah diuraikan diatas mengakibatkan pengaruh yang besar pada korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis.

Dampak fisik yang pertama adalah akan menimbulkan lecet pada vagina atau luka fisik lainnya, dan apabila hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yang diakibatkan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan. juga suami yang melakukan kekerasan fisik saat senggama.<sup>65</sup>

Perlakuan kasar suami dalam hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang hamil dan kondisinya dalam keadaan kelelahan dan capai atau ketiduran akan berakibat sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, dan bahkan keguguran. Istri yang cedera fisik akibat *marital rape* biasanya tidak mau berobat kedokter atau tabib karena malu. Kalaupun kedokter sebab sebenarnya dari penyakitnya tidak dijelaskan karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.<sup>66</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai kekerasan seksual yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga

<sup>65</sup>Muyassarotus Solichah. 2004. *Marital Rape; Perspektif Yuridis Viktimologis*, dalam Moehamad Shodiq (ed.) *Telaah ulang wacana seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEPCIDA

<sup>66</sup>Nurul Ilmi Idrus. 1999. *Marital Rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan*. Yogya: PPK UGM dan Ford Fondation

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dalam Pasal 8, kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi<sup>67</sup>:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selain itu, sebagai suatu bahan kajian menurut hasil penelitian LBH APIK Jakarta, beberapa variasi kasus pemaksaan “hubungan seksual” yang kerap terjadi menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH APIK Jakarta di antaranya yaitu:<sup>68</sup>

- a. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri dipaksa melakukan anal seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri.
- b. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
- c. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya.

<sup>67</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, pasal 8

<sup>68</sup>Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2012, hlm. 75.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
- e. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
- f. Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi.
- g. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
- h. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

### 3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yakni:<sup>69</sup>

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

<sup>69</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْأَسْوَدَ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasabercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaianbagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allahmengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'afkepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apayang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlahhingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitufajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkamu ber'itikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.<sup>70</sup>

Hal ini merupakan suatu keringanan dari Allah buat kaum muslim, dan Allah menghapuskan apa yang berlaku di masa permulaan Islam. Karena sesungguhnya pada permulaan Islam, apabila salah seorang di antara mereka berbuka, ia hanya dihalalkan makan dan minum serta

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersetubuh sampai salat Isya saja. Tetapi bila ia tidur sebelum itu atau telah salat Isya, maka diharamkan baginya makan, minum, dan bersetubuh sampai malam berikutnya. Maka dengan peraturan ini mereka mengalami masyaqaat yang besar. *Ar-Rafas*, dalam ayat ini artinya bersetubuh. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Ata, Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Tawus, Salim ibnu Abdullah, Amr ibnu Dinar, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Ad-Dahhak, Ibrahim An-Nakha'i, As-Saddi, Ata Al-Khurrasani, dan Muqatil ibnu Hayyan.<sup>71</sup>

Terkait dalam permasalahan ini dalam berhubungan seksual ada sebuah istilah yang disebut dengan '*azl (coitus interruptus)*' yakni menarik *dzakar* (penis) keluar dari *farji* (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Para ulama Madzhab memberikan pernyataan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa '*azl*' tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Diriwayatkan oleh sahabat Judamah:

"Dari Judamah bin Wahab saudara 'Ukasyah bahwasanya ia berkata: Saya hadir bersama Rasulullah dalam sebuah kelompok dan ia berkata: Saya hampir melarang *al-ghailah*, tetapi kemudian saya mempertimbangkan orang Roma dan Persia, dan mendapatkan

<sup>71</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-187.html> diakses pada 12 Maret 2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan-perempuan mereka biasa menyusui anak-anak mereka dalam keadaan hamil tanpa akibat buruk. Kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang ‘*azl* lalu beliau bersabda, ‘*azl* itu adalah pembunuhan anak secara tersembunyi (al-wa’d al-Khafiyy).”<sup>72</sup>

Seorang suami boleh melakukan ‘*azl* dengan syarat harus atas sepengetahuan istrinya dan kerelaan sang istri, supaya istri tidak kecewa karena istri juga mempunyai hak untuk dipuaskan. Syariat Islam membenarkan cara ini, karena zaman dahulu cara ini digunakan untuk ber-KB.<sup>73</sup> Dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya dengan merujuk pada hadits di atas dapat dipahami jelas bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya, seorang istri harus mendapatkan haknya untuk menikmatinya. Istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.

Dari sini jelaslah perspektif Al-Qur’an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

<sup>72</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal, juz III*, Beirut: Maktabah al-Islami, t.th, h. 68

<sup>73</sup> Maria Hidayah, *Seni Seks Islami (Gauli istrimu dari Arah Sesukamu)*, Klaten: Cable Book, 2012, hlm. 93.



## B. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Suami Menurut

### © Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam

#### 1. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual oleh Suami Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Ketentuan pidana yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah terdapat pada pasal-pasal:

- a. Pada pasal 46 yakni: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh enam juta rupiah)<sup>74</sup>

Sanksi pidana yang dijelaskan pada pasal ini merupakan sanksi dari tindakan pelanggaran terhadap pasal 8 pada bab 3 tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas jutarupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutam rupiah)”<sup>75</sup>

Dilihat dari rumusan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi beberapa ketentuan yakni setiap orang yang tinggal dalam

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga* Pasal 46 (Ketentuan Pidana)

<sup>75</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga*, Pasal 47 (Ketentuan Pidana)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup rumah tangga yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Hal yang dilarang dalam pasal ini adalah ”memaksa orang melakukan hubungan seksual dengan orang lain karena tujuan komersial atau tujuan tertentu”. Pengertian komersial mudah diterjemahkan yakni pemaksaan hubungan seksual tersebut diperjualbelikan dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, misalnya memaksa istri korban menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).

Pasal 48 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>76</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal ini merupakan bentuk khusus dari kekerasan seksual dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekhususannya adalah adanya pemberatan keadaan akibat adanya kekerasan seksual tersebut, yakni jika korban kekerasan seksual tersebut:

<sup>76</sup>Ibid, Pasal 48 (Ketentuan Pidana)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- b. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1(satu) tahun tidak berturut-turut.
- c. Gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. Untuk menentukan ada tidaknya hal-hal tersebut di atas yang menjadikan pemberatan tindak pidana kekerasan seksual, dapat dibuktikan dari keterangan ahli (dokter) yang dalam praktek keterangan tersebut dalam bentuk *Visum et repertum*.<sup>77</sup>

Kemudian Pasal 50 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dan korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Sedangkan untuk delik aduan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami

<sup>77</sup>*Ibid*, Pasal 48 (Ketentuan Pidana)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap istri termuat dalam pasal 53 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>78</sup>

## 2. Ketentuan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Suami terhadap istri Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam walaupun berlafad Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dan Fiqh Islam atau syari'at Islam yang bersumber kepada al-Qur'an As-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in. Lebih jauh HasbyAsh Shiddieqie menjelaskan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.<sup>79</sup>

Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini disebabkan menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu, yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti *munakahat*, *wirasah*, *muamalat* dalam arti khusus, *jinayat* atau *ukubat*, *al ahkamas-sultoniyyah*, *syiar*, dan *mukhasshamat*.<sup>80</sup>

<sup>78</sup>Ibid, Pasal 53 (Ketentuan Pidana)

<sup>79</sup>Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 112.

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau bagian bagian-bagian tersebut disusun menurut sistematika hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut.<sup>81</sup>

1) Hukum Privat:

- a) *Munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya.
- b) *Wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Muamalah dalam arti yang khusus. mengatur masalah kebendaan dan hak-hakatas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya.

2) Hukum Publik

- a) *Jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir.
- b) *Al-ahkam Assultoniyah* membicarakan soal-soal yang berpusat kepada negara, ke pemerintah.
- c) *Siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungannya dengan pemeluk agama dan negara lain.

---

<sup>81</sup>Rosyadi dalam Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm.13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Mukshshonat* mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.

Ajaran Islam merupakan segala ketentuan dan aturan yang mengatur kehidupan manusia, tentang bagaimana hubungannya dengan penciptanya (*hablum minallah*), dan hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya (*hubllum minannas*) dan segala bentuk aturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dengan penciptanya dan dengan manusia lain disebut dengan hukum islam, hukum Islam berorientasi kepada kemaslahatan (*maslahah oriented*). Menurut Abu Zahroh ada tiga tujuan hukum Islam.

- a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak menjadi sumber malapetakata bagi orang lain.
- b. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal di antara sesama ummat Islam maupun eksternal antara ummat Islam dengan masyarakat luar. Agama Islam tidak membedakan manusia dari segi keturunan, suku bangsa, agama. Warna kulit dan sebagainya. Kecuali ketaqwaan kepada-Nya.
- c. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia dan masyarakat. Bukan kemaslahatan semu untuk sebagian orang atas dasar hawa nafsu yang berakibat penderitaan bagi orang lain, tapi





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan bagi semua orang, kemaslahatan yang betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak.<sup>82</sup>

Kemaslahatan hakiki itu meliputi lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara kelima hal tersebut, dengan pengertian sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Memelihara agama adalah memelihara kemerdekaan manusia di dalam menjalankan agamanya.
- b. Memelihara jiwa adalah memelihara hak hidup secara terhormat memelihara jiwa dan segala macam ancaman, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.
- c. Memelihara akal adalah memelihara manusia agar tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi sumber kejahatan dan penyakit di dalam masyarakat.
- d. Memelihara keturunan, adalah memelihara jenis anak keturunan manusia melalui ikatan perkawinan yang sah yang diikat dengan suatu aturan hukum agama.
- e. Memelihara harta benda adalah mengatur tatacara mendapatkan dan mengembangkan harta benda secara benar dan halal.

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didalam hidupnya baik yang bersifat *daruri*, *haaji*

<sup>82</sup> Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, hlm. 364.

<sup>83</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015, hlm. 25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan *tahsini*, yang prinsipnya adalah menarik manfaat dan menolak kemadharatan.<sup>84</sup> Tujuan hukum Islam yang bersifat khusus adalah yang berkaitan dengan satu persatu aturan hukum Islam. Hal ini dapat diketahui dengan memahami asbabun nuzul dan hadits-hadits yang shahih.

Lebih lanjut, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam, selain untuk memelihara lima hal yang hakiki (*dharuriyat*), juga dimaksudkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam rangka mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh manusia, dan tidak menimbulkan dampak yang membahayakan atau merusakkan kehidupannya.<sup>85</sup>

#### b. Hubungan Seksual Suami Istri dalam Tinjauan Hukum Islam.

Hubungan seksual antara suami istri merupakan hal yang penting dan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Tidak mementingkan hal itu atau menempatkannya bukan pada tempatnya akan mengguncangkan kehidupan rumah tangga.<sup>86</sup> Nabi Muhammad SAW menganjurkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan seksual karena dalam hubungan seksual suami istri terdapat rahmat dan bermanfaat untuk menundukkan pandangan, menguatkan jiwa dan menghindarkan diri dari perselingkuhan.<sup>87</sup>

<sup>84</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. hlm. 97.

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi dalam Luthfiatun Nafisah, *Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Jember, 2015, hlm. 3

<sup>87</sup> Saebani dalam Luthfiatun Nafisah, *Kekerasan Seksual terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. IAIN Jember, 2015, hlm. 4

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan hubungan suami istri, di antara kedua belah pihak akan menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi, yaitu hak dan kewajiban. Bahkan hampir dalam semua literatur fiqh klasik, dalam hak dan kewajiban suami istri telah menempatkan hubungan seksual suami istri sebagai kewajiban bagi istri dan hak bagi suami. Sebagaimana yang diungkapkan az-Zuhaili, bahwa kewajiban istri yang menjadi hak suaminya, selain harus menjaga rumah, harta dan anak-anaknya dengan baik, istri juga harus taat kepada suaminya dalam hal hubungan seksual (jima'), disamping kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>88</sup>

Salah satu ayat al-Qur'an yang populer dijadikan rujukan tentang hubungan seksual di antara suami istri adalah surat al-Baqarah ayat 223 yakni:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itubagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan*

<sup>88</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, VIII, hlm. 334-337.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*  
(Q.S. Al-Baqarah: 223)<sup>89</sup>

Ayat mengandung jawaban atas pertanyaan apakah boleh untuk menyetubuhi istri dari arah belakangnya, dimana terdapat pertanyaan seperti ini dari sebagian mereka. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan itu asalkan tetap dalam kemaluannya, dan istri dalam keadaan suci dari haidh dan nifas. Dinamakan wanita sebagai ladang karena rahimnya adalah tempat untuk tumbuhnya anak sebagaimana tanaman dapat tumbuh di atas tanah yang baik. Selama perkaranya seperti itu, maka boleh bagi suami untuk menggauli istrinya dari arah depan ataupun belakang sesuai keinginannya, karena tujuannya untuk menjaga dari perbuatan keji dan mengharapkan anak keturunan. Firman Nya “bagaimana saja kamu kehendaki” maksudnya pada keadaan mendatanginya dari depan maupun belakang, terserah kalian dengan syarat tetap pada kemaluan, bukan pada duburnya. Kemudian Allah Ta'ala menasehati hamba-hamba Nya dengan firman Nya “Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu” berupa kebaikan yang bermanfaat bagi kalian untuk akhirat dan ketahuilah bahwa kalian akan bertemu dengan Allah maka janganlah kalian lalai dari mengingat Nya dan taat kepada Nya. Karena inilah bekal yang bermanfaat bagi kalian pada hari kalian berdiri di hadapan Nya. Terakhir, Allah memerintahkan rasul Nya untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin dengan kebaikan

<sup>89</sup>Depertemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan* (Al-Baqarah 2: 223)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dunia dan akhirat, serta kebahagiaan pada keduanya bagi siapa saja yang imannya benar dan menumbuhkan ketakwaan serta amal shaleh.<sup>90</sup>

Dalam *tafsir Al- Azhar* Hamka menjelaskan bahwa istri ibarat sawah ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik sawah ladang boleh masuk ladang kapanpun dia suka dan mau, namun dalam menanam benih juga harus memperhatikan pada saat yang tepat agar tidak sia-sia.<sup>91</sup>

Menurut Ibn Hazm dalam al-Muhallah, hubungan seksual adalah hak istri dan seorang suami diwajibkan mencampuri istrinya minimal satu kali masa suci, jika ia mampu melakukannya. Apabila ia tidak mampu melakukannya berarti ia telah melanggar ketetapan Allah.<sup>92</sup> Adapun ayat yang digunakan dalil olehbn Hazm adalah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
 حَتَّى يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
 وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah Haidh itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh dan janganlah kamu mendekat mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka

<sup>90</sup><https://tafsirweb.com/859-quran-surat-al-baqarah-ayat-223.html>

<sup>91</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1983), jilid II, hlm. 214-215.

<sup>92</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, IX, hlm. 6844.

itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q. S. Al-Baqarah ayat 222).

**c. Ketentuan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Suami terhadap istri Menurut Hukum Islam**

Kejahatan (*Jarimah/Jinayat*) didefinisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lafal *had* mempunyai dua arti, yaitu artiumum dan arti khusus. *Had* dalam arti umum meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* baik hal itu merupakan hak Allah maupun hak individu. Dalam pengertian ini termasuk hukuman *qishash* dan *diat*. Dalam arti khusus *had* itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah, seperti hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dera seratus kali untuk *jarimah* zina. Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya. Misalnya untuk menetapkan hukuman, maka yang berwenang adalah (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.

Pada dasarnya pengertian jinayah ini mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Pengertian-pengertian ini biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh fukaha. Perkataan jinayah berarti suatu perbuatan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang oleh syara. Dan juga yang mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan, perlukaan dan lainnya.<sup>93</sup>

Fikih jinayah adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang Al-Quran dan hadis Nabi saw., serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut (tindakan kriminal). Tindakan kriminal adalah perbuatan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang atau aturannya, sehingga apabila hal tersebut dilanggar atau diabaikan maka akan terkena hukuman dan inilah yang dimaksud dengan tindak pidana.<sup>95</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>96</sup>

Pengertian lain yang lebih operasional adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan perbuatan kriminal yang dilakukan

<sup>93</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1

<sup>94</sup>Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undang dan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.111

<sup>95</sup>Noor Wahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1994, hlm. 16

<sup>96</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>97</sup>

Secara khusus kata jarimah dipakai untuk menyebut tindak pidana dalam pidana Islam dan diartikan sebagai melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau takzir.<sup>98</sup>

Hukum pidana Islam dan konvensional membagi pembunuhan kepada dua bagian, yakni sengaja dan tidak sengaja. Keduanya ini masuk pada kategori kejahatan terhadap jiwa. Namun, disisi lain juga ada kejahatan selain jiwa seperti penganiyaan yang mana tidak sampai sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia.<sup>99</sup>

Sebelum menjatuhkan hukuman seorang hakim harus mengetahui dengan seksama kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kekerasan seksual dalam rumah tangga. Karena dalam hukum Islam ada beberapa klasifikasi hukuman bagi pelaku *jarimah*, antara lain *jarimah hudud qishas, diyat, rajam*, serta *ta'zir*. Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan tersebut termasuk *jarimah positif* atau *jarimah negatif*.

<sup>97</sup> Asep Saepudin. *Op Cit*. hlm.111

<sup>98</sup> *Ibid*. hlm.146

<sup>99</sup> *Ibid*. hlm.151

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jarimah Positif (*Jarimah Ijabiyyah*): *Jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina dan pemukulan.
- b. Jarimah Negatif (*Jarimah salabiyyah*): *Jarimah* yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, enggan melakukan salat dan puasa.

Apabila dilihat dari dua jenis jarimah diatas, kekerasan seksual masuk ke dalam jarimah negatif. Adapun jika di tinjau dari macam jarimah kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah yang mendapatkan hukuman *ta'zir*.

Menurut hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam jarimah *ta'zir* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*. Para *fuqaha* sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh *syara'* dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan). yang meliputi *jarimah ta'zir* termasuk di dalamnya adalah pidana pasungan, pengasingan, pengisolasian, skors, dan pidana kurungan/penjara.

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelangan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang tidak termasuk dalam definisi di atas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak, tidak konkret. Perbuatan menyakiti perasaan dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada jarimah takzir.<sup>100</sup>

Pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut.<sup>101</sup>

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).

Menurut penulis, ini merupakan salah satu keindahan hukum Islam. Dimana Islam memberikan ruang kepada manusia untuk menerapkan sanksi yang pantas sesuai kondisi dan situasi serta zaman yang terus mengalami perubahan. Tentunya dalam suatu komunitas pasti ada hati nurani yang dipakai dalam penerapan sanksi hukuman tersebut. Sehingga

<sup>100</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit.* hlm.180

<sup>101</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Op Cit*

dicapai keadilan bagi si korban atau setidaknya lebih dekat dengan rasa adil. Hal ini sungguh sangat berbeda dengan penerapan sanksi dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang cenderung belum tentu menemui rasa keadilan bagi si korban.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebagai tolak ukur terhadap penelitian yang penulis lakukan dan juga bisa dijadikan referensi akademik untuk penyempurnaan penelitian yang penulis lakukan serta untuk menghindari tindakan plagiat dalam penulisan maka oleh penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi atau kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah:

1. Tesis yang ditulis oleh Darnis dengan judul “Marital rape dalam tinjauan Hukum Islam” Prodi Hukum Islam, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.<sup>102</sup> Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Darnis PPs UIN Suska Riau, 2014 dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada substansi penelitian itu sendiri yakni kasus kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*Marital Rape*). Sedangkan secara teknis penelitian yang dilakukan oleh Darnis sangat jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, fokus penelitian yang dilakukan oleh Darnis adalah tentang pandangan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam terhadap kasus *marital*

<sup>102</sup> Darnis, *Marital rape dalam tinjauan Hukum Islam*, Prodi Hukum Islam, Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*rape* serta pengklarifikasian terhadap pertentangan antara undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus terhadap spesifikasi undang-undang tersebut pada pasal 5 dan 8 yang menjelaskan tentang larangan dan delik hukum terhadap tindakan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*marital rape*) sertasanksi hukum pada pasal 47 terhadap tindakan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*marital rape*). Penelitian yang penulis lakukan membahas bagaimana relevansi (kesesuaian) antara delik hukum pada pasal 5 dan 8 serta sanksi hukum terhadap tindakan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*marital rape*) dengan perspektif Hukum Islam terhadap kasus tersebut.

2. Tesis dengan judul “*Nasyus dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan relevansinya dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*” yang ditulis oleh Miftakhul Mukharomah PPs UIN Suska Riau tahun 2016.<sup>103</sup>

Subtansi penelitian ini adalah permasalahan *Nusyus* dan fokus penelitiannya adalah bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap tindakan *nusyus* oleh suami terhadap istri dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Sedangkan subtansi dari penelitian yang penulis lakukan adalah *marital rape* (kekerasan seksual dalam pernikahan) dan fokus penelitian yang penulis

<sup>103</sup>Miftakhul Mukharomah, *Nasyus dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan relevansinya dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga)*, Tesis PPs UIN Suska Riau Tahun 2016.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan adalah bagaimana perspektif hukum Islam dan undang-undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 terhadap *marital rape* (tindakan kekerasan seksual dalam pernikahan). Secara substansial penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan akan tetapi secara alur dan teknis memiliki persamaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis lakukan persamaan terletak pada perspektif undang-undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004.

Tesis dengan judul “*Cerai gugat di pengadilan agama tembilahan, analisis terhadap putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan agama tembilahan tahun 2017*”.<sup>104</sup> tesis ini ditulis oleh Yusron Harianto PPs UIN Suska Riau Tahun 2018. Penelitian menjelaskan tentang kasus cerai gugat yaitu perceraian yang inisistifnya dari pihak istri yang dilatar belakangi oleh adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelitian ini fokus terhadap kasus gugat cerai di Pengadilan Agama tembilahan yang di latar belakangi oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), faktor-faktor yang mempengaruhinya serta bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap kasus tersebut. Jika kita tinjau secara substansi penelitian, teknis dan alur penelitian penelitian yang ditulis oleh Yusron ini tidak memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan akan tetapi jika kita telaah secara komprehensif dan holistik penelitian ini

<sup>104</sup>Yusron Harianto, “*Cerai gugat di pengadilan agama tembilahan, analisis terhadap putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan agama tembilahan tahun 2017*” (PPs UIN Suska Riau, 2018)

dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama mengangkat tentang permasalahan ketertindasan yang dialami oleh perempuan dalam pernikahan karena undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik dari aspek fisik, psikis maupun kekerasan seksual.

Publikasi Ilmiah yang ditulis oleh Nurul Huda mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005 yang berjudul, “*Analisis Hukum PN Sidoarjo tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004*”. Publikasi ilmiah ini membahas tentang hukuman hakim PN Sidoarjo terhadap pelaku tindakan KDRT dimana menurut Qishas seperti yang ditimpakan pelaku terhadap korban.<sup>105</sup>

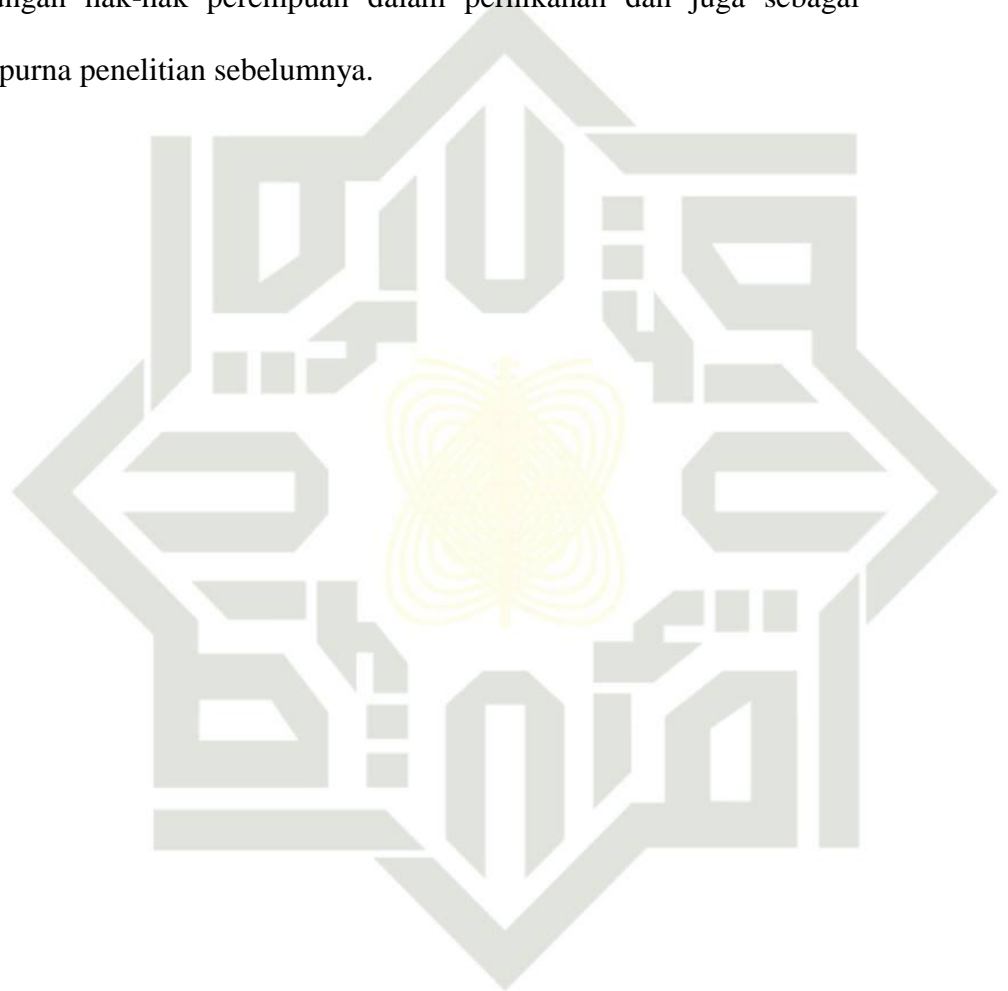
Publikasi Ilmiah yang ditulis oleh Arif Karunia Rahman mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012 yang berjudul, “*Studi Analisis Marital rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Publikasi ilmiah ini membahas tentang studi hukum baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum islam.<sup>106</sup>

Berdasarkan kepada literatur yang telah dikemukakan dalam bentuk Tesis dan Publikasi ilmiah yang telah ditulis oleh peneliti

<sup>105</sup>Nurul Huda, “*Analisis Hukum PN Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*”, (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

<sup>106</sup>Arif Karunia Rahman, “*Studi Analisis Marital rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, walau ada beberapa kesamaan secara substantif pada objek penelitian akan jika ditinjau secara teknis penelitian ini belum ada diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian ini adalah yang terabdet dan terkini sehingga bisa menjadi sebagai paradigma terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan juga sebagai penyempurna penelitian sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. *Library research* (kepastakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literature-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

#### B. Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan ini merupakan sumber data dalam penelitian ini meliputi seluruh bab dan pasal terutama pasal 5 dan 8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. Kemudian literatur-literatur, undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan seksual oleh suami terhadap istri.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti: Kompilasi hukum Islam, buku-buku hukum pidana, buku-buku hukum pidana Islam, dan buku-buku yang berhubungan dengan larangan pemaksaan hubungan seksual.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.”<sup>107</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer yaitu terjemahannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang hukum pidana terkait dengan kekerasan seksual oleh suami terhadap istri. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

<sup>107</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 1998, hlm. 114.

#### D. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis, penelitian harus memastikan pola analisis yang digunakan. Berkaitan dengan hal ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis Isi (*Content Analysis*).

Pada dasarnya, data deskriptif seringkali dianalisis menurut isinya atau disebut analisis isi (*content analysis*).<sup>108</sup> Penelitian yang berdasarkan analisis isi, ini secara mendasar berorientasi empiris, bersifat menjelaskan, menguraikan, yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata dan bertujuan prediktif.

Diantara ciri analisis isi yakni objektif, sistematis, replikable, manifest, perangkuman, dan generalisasi.<sup>109</sup> Penelitian objektif dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti.

Selain objektif, analisis isi juga harus sistematis. Sistematis ini bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas, dan sistematis. Kategori diturunkan dari variabel-variabel diturunkan berdasarkan teori, pengujian dibuat berdasarkan hipotesis. Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai menggunakan suatu definisi tertentu, dan

<sup>108</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 85.

<sup>109</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

semua bahan yang dianalisis dengan menggunakan kategori dan definisi yang sama.

Salah satu ciri penting lainnya dari analisis isi yaitu ia harus replikabel. Penelitian dengan temuan tertentu dapat diulang dengan menghasilkan temuan yang sama pula. Hasil-hasil dari analisis isi sepanjang menggunakan bahan dan teknik yang sama, harusnya juga menghasilkan temuan yang sama. Selain itu ciri lain dari analisis isi ialah isi yang tampak (manifest). Ciri analisis isi selanjutnya yaitu ditujukan untuk membuat rangkuman (*summarizing*). Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum karakteristik dari suatu isi atau pesan. Meskipun begitu, analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan rangkuman, tetapi juga berpotensi untuk melakukan generalisasi.

Selain itu, peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. pola pikir deduktif yaitu metode analisa data denganmemaparkan data-data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum bagaimana konsep hukum islam terhadap UU No 23 Tahun 2004, terkait kekerasan seksual oleh suami terhadap istri (*marital rape*), kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan hukum pidana Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan; (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.” Dari sini dapat dipahami bahwa secara tegas pada Hukum Positif di Indonesia kekerasan seksual dalam perkawinan atau dalam lingkup rumah tangga (*marital rape*) di larang secara tegas, dan termasuk dalam ranah hukum pidana.
2. Hukum Islam memandang kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diajarkan berumah tangga untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* dalam suatu pernikahan. *Marital rape* juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana Islam karena dampak fisik dan psikis yang dialami korban. Berdasarkan analisis ini dapat ditetapkan bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sejalan dengan hukum Islam.
3. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketetapan bentuk perlakuan kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh hukum positif di Indonesia ini telah jelas, dan kedua bentuk ini dilarang keras serta diancam dalam hukum pidana penjara.
4. Hasil pemahaman nash al-Quran dan hadis untuk menganalisa bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam hukum Islam menikmati hubungan seksual (*pleasure*) merupakan salah satu tujuan pernikahan dan hal itu merupakan hak dan kewajiban bagi suami-istri. Kedua belah pihak harus saling memperhatikan hak tersebut terhadap pasangannya. Namun, mengabaikan kenikmatan seksual pasangan tidak termasuk dalam bentuk *marital rape* yang ringan atau makruh hukumnya. Hanya peneliti menganggap memperhatikan kenikmatan seksual yang dirasakan pasangan termasuk hal yang penting. Walaupun tidak begitu fatal akibat yang dirasakan. Dan poin ini tidak berlaku jika telah ada komunikasi di antara suami-istri. Pemaksaan hubungan seksual tidak akan terjadi jika melakukan *foreplay* yang cukup sebelum berhubungan seks. Para fuqaha' menganjurkan *foreplay* sebelum melakukan hubungan intim untuk membangkitkan libido istri agar tidak terjadi kekecewaan karena istri belum terpenuhi hajatnya. Dan dengan melakukan *foreplay* dapat menghindari terjadinya pemaksaan hubungan seksual karena syahwat istri



yang siap untuk melakukan hubungan seks. Selain itu, hukum Islam pun melarang tegas anal seks serta hubungan seks ketika haid yang menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak dilarang, asalkan disetujui pasangan.

## B. Saran

Salah satu upaya mengurangi tindak kekerasan seksual dengan memberikan pemahaman gender yang baik, pemahaman gender yang baik dapat mempengaruhi cara pandang yang baik dalam melihat hak dan kewajiban suami-istri lingkup rumah tangga

2. Diharapkan sanksi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi pelaku sekaligus publik untuk merubah moral yang buruk menjadi lebih baik.
3. Kepada pasangan suami istri untuk dapat mendalami pemahaman terhadap nash al-Quran dan Hadis sehingga interpretasi yang lebih relevan dan kontekstual lebih lanjut sangat dibutuhkan dengan mengacu pada *maqasid as-syari'ah* dan Islam adalah *rahmah li al-'alamin*.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

1. A. Djazuli, Fiqih Jinayah. 2000. *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Abdurahman Thalib al-jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman: Cahaya Hati), 2009.
- Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. I, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002.
- Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, juz III (Beirut: Maktabah al-Islami, t.th)
- Abu Umar Basyir, 2006. *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*. Sukoharjo: Rumah Dzikir
- Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar. 2010. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Amna Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka. 1994.
- Ati Karunia Rahman, “*Studi Analisis Marital rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, (IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asep Saepudin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana
- Depertemen Agama, Al-qur'an dan terjemahan (Al-Baqarah 2 : 223)
- Santoso, Edy.(ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta :PSW IAIN Sunan Kali Jaga bekerjasama, 2002.
- El N. Hasbianto, *Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*.
- Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta, Rifki Anisa, 2000.
- Elli Nurhayati, *panduan untuk pendamping korban kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)* November 1996.
- Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998).
- George Mayor, "Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga", *Lex Crimen*, 6, Agustus, 2015.
- Gunse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press. 2012.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1983), jilid II,
- Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*.

Ibrahim Hosen, “Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam”, dalam Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Maria Hidayah, *Seni Seks Islami (Gauli istrimu dari Arah Sesukamu)*. Klaten: Cable Book. 2012.

Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: PT. Mizan, 1997.

Miftakhul Mukharomah, *Nasyus dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan relevansinya dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga)*, Tesis PPs UIN Suska Riau Tahun 2016.

Milda Marliah. 2007. *Marital Rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed). 2003. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hasdis “Misoginis”*. Yogya: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation

Meiljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Muyassarotus Solichah. 2004. *Marital Rape; Perspektif Yuridis Viktimologis*, dalam Mochamad Shodiq (ed.) *Telaah ulang wacana seksualitas*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEPCIDA

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).

Nurul Huda, “*Analisis Hukum PN Sidoarjo Tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*”, (IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

Nurul Ilmi Idrus. 1999. *Marital rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation.

Qardhawi, Yusuf, 1999. *Hâdî al-Islâm Fatâwâ Mu’âsirah*, terj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid I, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Siti ‘Aishah, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren. 2007).

Suparsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, Jakarta, 1998.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

Sa’yyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Nor Hasanuddin*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

- Susilo, M. E. 2013. *Islamic Perspective on Marital Rape*. Jurnal Media Hukum, 20 (2)
- Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah. 2006. *AlJami’Fii Fiqhi An Nisa’*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M., Fiqih Wanita. JakartaTimur: Pustaka Al-Kautsar
- Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, *Penghapusan Kekersan Dalam rumah Tangga*.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, IX.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, VIII.
- Wahidah, Noor. 1994. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash
- Yusron Harianto, “*Cerai gugat di pengadilan agama tembilahan, analisis terhadap putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di pengadilan agama tembilahan tahun 2017*” (PPs UIN Suska Riau, 2018).

UIN SUSKA RIAU





POSTAL SERVICES

State Islamic University

# CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Eko Setiawan

ID Number : 21890215352

Date of Birth : July 10, 1992

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

## English Proficiency Test

Listening Comprehension : 53

Structure &amp; Written Expressions : 52

Reading Comprehension :50

Overall Score : 517

Expired Date: February 28, 2022



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP: ~~19720421~~ 2006041003

The Committee of Language Development centers  
**CLDC**  
State Marine University of Salem, Springfield, Oregon

**English Proficiency Test® Certificate** Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
The scores and information presented in this score report are approved

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832

Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum.

# LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

## SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Eko Setiawan

Nomor ID : 21890215352  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tanggal Lahir : 10 Juli 1992

بيان النتائج لاختبار العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع	58 :
القواعد	59 :
القرأة	63 :
النتيجة	600 :

Berlaku Hingga : 27 Oktober 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823  
Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)

Mahyudin Syukri, M. Ag.  
The Head of Language Development Center





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

NIM

PROGRAM STUDI

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

JUDUL TESIS/DISERTASI

Eko Setiawan

21890215352

Hukum Keluarga

Hukum Keluarga

Dr. Azmi

Dr. Wahidin, M.Ag.

Marital Rape dalam

UU no. 23 tahun 2004

ditinjau dalam perspektif  
Hukum Islam.

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS, DISERTASI

- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	20/4/2020	BAB I		
2.	4/5/2020	BAB II - III		
3.	9/7/2020	BAB III		
4.	10/11/2020	BAB IV		
5.	20/1/2021	BAB V		
6.	22/3/2021	Begitu dimungkas		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 22/3/2021

Pembimbing I / Promotor \*

Dr. H. H. H.

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	25/4/2020	BAB I		
2.	10/5/2020	BAB II		
3.	15/7/2020	BAB III		
4.	17/11/2020	BAB IV		
5.	25/1/2021	BAB IV		
6.	26/3/2021	BAB V dan Acc		

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 26/3/2021

Pembimbing I / Co Promotor \*

Dr. H. H. H.



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Fiko Setyawan  
NIM : 21890215352  
PROGRAM : Pascasarjana  
PRODI : Hukum Keluarga  
KONSENTRASI : Hukum keluarga

NAMA :  
NIM :  
PROGRAM :  
PRODI :  
KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Selasa, 17.12.19	Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di MTS Swasta dan Kecamatan Tambusi.		
2	Selasa, 17.12.19	Model manajemen pendidikan Abuja Aidarus Abdul Ghani dalam pengelolaan Pondok Pesantren Darussalam.		
3	Selasa, 17.12.19	Pengelolaan Program Tahfidz Al-Quran di SDIT Tahfidz Al-Mahdi, Pekanbaru.		
4				
5				

Pekanbaru,  
Direktur,

20....

UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Afrizal, M, MA

NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Eko Setyawan  
: 21890215352  
: Pascasarjana  
: Hukum keluarga  
: Hukum Keluarga

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Kamis, 05/12/19	Peran ganda perempuan kampung		
2		dalam rumah tangga' Harmonis		
3		menurut Hukum Islam		
4	Kamis 05 12 19	Itsbti nikah pada pengesahan perni-		
5		lahan sirri perspektif maqasid syariah		
6		(study analisis kompilasi Hukum Islam Pesky)		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,  
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal ini milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I





**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Eko Setiawan  
NIM : 21890215352  
PROGRAM : Pascasarjana  
PRODI : Hukum Keluarga  
KONSENTRASI : Hukum keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Rabu, 4/12/2019	Mahna luhba yang terdapat pada ayat tentang perintah wasiat dalam al-Quran		
2	Rabu, 4/12/19			
3		Keadilan sebagai Hak Asas manusia menurut sayyid Qutub		
4		(ayat - ayat tentang keadilan) dalam Tafsir fi dzilalil Quran		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 4 Desember 2019  
Direktur,

**UIN SUSKA RIAU**

**Prof. Dr. Afrizal, M, MA**  
NIP. 19591015 198903 1 001

**NB:** Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Fko Setiawan  
Pascasarjana  
HK  
HK

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Semn 23/12/19	Peran Pemimpin pondok Pesantren dalam meningkatkan kualitas d. pesantren, Kec. Kampar Kab. Kampar	X	
2				
3				
4				
5				
6				
7	Semn, 23/12/19	Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam meningkatkan minat masyarakat MTS se Kec. Bungke	X	
8				
9				
10				
11	Semn, 23/12/19	Pengaruh Pelaksanaan Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Peningkatan Kinerja Tenaga Pendidik se-Kec. Persempinan Raya	X	
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 23/12/19  
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar





NIM

PROGRAM  
PASCASARJANA  
PENGANTARAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Eko Setiawan  
: 218 902 153 52  
: Parca Sarjana / SZ  
: Hukum Keluarga  
: Hukum Keluarga

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
①	Wali Mujbir Dalam Perkawinan Bagi Gadis dan Janda (baligh) menurut pemikiran Imam Abu Hanifah (Analysis Magasid Syarah)	23/12/19	
②	Iddah wanita hamil dalam pemikiran Ibnu Qudamah		
③	Kewarisan Harta Lupaun Perspektif hukum Islam (studi kasus desa pulau birandang kec. kampar, kab. kampar)		
④	Hukum dalam masyarakat melayu menurut perspektif hukum Islam (analisis peran adat adat di desa melara kecamatan Rambai Liris Kabupaten Rokan Hulu)		

Pekanbaru, 23 Desember 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

AB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar





NIM

PROGRAM

PROG  
KONSERASI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Eto Sehanan  
: 210 902 153 52  
: Pasca Sarjana  
: HK  
: HK

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
Senin 23/12 '19	① Nilai-nilai pendidikan jiwa dalam buku tasawuf modern karya Buya Hamka.		Fahri Razi
Senin 23/12 '19	② Pendidikan berbasis fitrah dalam proses pembelajaran di SDIT se-kecamatan, Kota Pekanbaru		Relvita Yusra
Senin 23/12 '19	③ kemampuan manajerial dan penerapan manajemen waktu oleh ketua prodi PTKIS dalam menghasilkan lulusan tepat waktu di Kota Batam		Tabri Waluyo

Pekanbaru, 23 Desember 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Eko Setiawan  
: 218 902 153 52  
: Pasca Sarjana S2  
: HK  
: HK

NAMA  
NIM  
PROGRAM  
Pascasarjana  
Konsentrasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

ISL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
2019	Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq mengenai at-tayyib hukum keluarga (akhlak saksi-saksi) dalam kitab fikih sunnah		
2019	Konsep manajemen keuangan keluarga dalam Islam		

Pekanbaru, 23 Desember 2019  
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA  
NIP. 19591015 198903 1001

: Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
: setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Status Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIODATA PRIBADI**

NAMA : EKO SETIAWAN, S.H.I

TEMPAT TANGGAL LAHIR : PONOROGO, 10 JULI 1992

ALAMAT : JALAN TANJUNG NO.28, RT 03 RW 01,  
DUSUN DUWET, DESA BANCAR,  
KECAMATAN BUNGKAL, KAB.PONOROGO

ANGKATAN/KELULUSAN KMI : TAHUN 2012 (PIONEER GENERATION)

TAHUN KELULUSAN S 1 UNIDA : TAHUN 2016 (WISUDAWAN KE 26)

NOMER HP : 081232406932 / 082294689068

NAMA AYAH KANDUNG : MUJIONO

PEKERJAAN : PETANI

NAMA IBU KANDUNG : JARMI

NOMER HP : 081335437173

PEKERJAAN : PETANI/IBU RUMAH TANGGA

JUMLAH SAUDARA : 2 BERSAUDARA

**Riwayat Pendidikan Non Pesantren:**

1. TK BUSTANUL ATHFAL AISIYAH BANCAR : Tahun 2000-2001
2. SDN 02 BANCAR, BUNGKAL, PONOROGO : Tahun 2001-2006
3. MTsN 1 JETIS, PONOROGO : Tahun 2006-2008

**Riwayat Pendidikan Selama Di Pesantren Gontor & Unida**

1. CALON PELAJAR KELAS A2 DI GONTOR KAMPUS 2, MADUSARI, SIMAN (2 JULI 2008)
2. KELAS 1 INTENSIVE B, KMI GONTOR PUSAT PONOROGO (TAHUN 2008-2009)
3. KELAS 3 INTENSIVE B, KMI GONTOR PUSAT PONOROGO (TAHUN 2009-2010)
4. KELAS 5 B, KMI GONTOR PUSAT PONOROGO (TAHUN 2010-2011)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. KELAS 6 D, KMI GONTOR PUSAT PONOROGO **(TAHUN 2011-2012)**
6. FAKULTAS SYARI'AH PRODI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM, UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR **(TAHUN 2012-2016)**
7. PASCA SARJANA, FAKULTAS AKHWAL SYAKHSIYAH, PRODI HUKUM KELUARGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASYIM, PEKANBARU, RIAU **(T.A. 2018/2019 - SEKARANG "SEMESTER 3")**

#### PENGALAMAN SELAMA DI PONDOK PESANTREN GONTOR

##### SEMASA SANTRI KMI:

1. ANGGOTA DEWAN KERJA KOORDINATOR **(2008-2010)**
2. KETUA PPAT AWAL TAHUN KONSULAT PONOROGO **(2010)**
3. PANITIA PERGANTIAN PENGURUS FIRQOH "ATOMIC FUTSAL CLUB" **(2010)**
4. KETUA 1 RAYON ANAK LAMA "SHIGHOR" GEDUNG INDONESIA 2 LANTAI 1 **(TAHUN AJARAN 2010/2011)**
5. PANITIA PERKEMAHAN KAMIS JUM'AT **(2011)**
6. BAGIAN KEAMANAN MUQIMIN PADA LIBURAN AWAL TAHUN **(2011)**
7. KETUA PANITIA LOMBA PIDATO ANTAR KELAS LIMA **(2011)**
8. KOMANDAN PLETON KONSULAT PONOROGO DI LKBB ANTAR KONSULAT, PEKAN PERKENALAN KHUTBATUL'ARSY **(2011)**
9. SEKRETARIS PANITIA LOMBA PIDATO ANTAR ZONA UNTUK KELAS 1,2,3,4, 1 INT DAN 3 INT **(2010)**
10. PANITIA DRAMA ARENA DAN PANGGUNG GEMBIRA **(2011&2012)**
11. BAGIAN DIESEL DAN PEMBANGUNAN DI PANITIA BULAN RAMADHAN, PANITIA BULAN SYAWWAL,&SELAMA KELAS 6 KMI
12. PANITIA INTI SISWA AKHIR KMI **TAHUN 2012** SIE.PERWAKAFAN

##### SEMASA GURU KMI:

1. STAF PEMBANGUNAN GONTOR PUSAT **(2012-2015)**
2. STAF PEMBANGUNAN TAHAP KEDUA GONTOR PUTRI KAMPUS 7, PEKANBARU, RIAU **(2013-2014)**
3. STAF PEMBANGUNAN TAHAP AWAL (PEMBUKAAN LAHAN) GONTOR PUTRA 14, SIAK, RIAU **(2014)**
4. KETUA ANGKATAN PENGABDIAN GURU BARU 2012 GONTOR PUSAT **(2012/2013)**
5. KETUA GMF "GRADUATE MUSIC FESTIVAL" DI GONTOR KAMPUS PUSAT **(2013)**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. KETUA KOORDINATOR DESA PADA KKN KE-26 UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DI DESA SLAHUNG DAN SEKITARNYA **(2015)**
7. KETUA 2 PANITIA BAKSOS 'IDUL ADHA DI DESA JAMBON, KEC JAMBON, KAB.PONOROGO **(2013)**
8. PANITIA TAHUNAN SIE PERLENGKAPAN DI PKA DAN 'IDUL ADHA (QURBAN)
9. PANITIA UJIAN AWAL TAHUN KMI GONTOR PUSAT **(2015/2016)**
10. STAFF BAAK UNIVERSITAS DARUSSALAM KAMPUS 6 MAGELANG **(2015-2016)**
11. PANITIA UTS DAN UAS DI UNIDA KAMPUS 6 MAGELANG **(2016)**
12. DOSEN (PENGANTI) SELAMA 1 SEMESTER PADA MATA KULIAH ILMU ALAMIAH DASAR PRODI HES DI UNIDA KAMPUS 6 MAGELANG **(2016)**
13. TEAM PENTASHIH SOAL UJIAN DI KMI GONTOR KAMPUS 6 MAGELANG **(2016)**
14. KETUA PEMBIMBING DRAMA ARENA GONTOR KAMPUS 6 MAGELANG **(2016)**
15. KETUA PEMBIMBING PANGGUNG GEMBIRA GONTOR KAMPUS 6 MAGELANG **(2017)**
16. KETUA PEKAN PERKENALAN KHUTBATUL'ARSY GONTOR KAMPUS 6 MAGELANG **(2016)**
17. KETUA PEMBIMBING PAGELARAN SENI GSD "GEBYAR SENI DARUSSALAM" DI GONTOR PUTRI KAMPUS 7 **(2018)**
18. KETUA PEMBIMBING PEKAN OLAHRAGA DAN SENI DI GONTOR PUTRI KAMPUS 7 **(2018)**
19. KETUA PANITIA UJIAN AKHIR TAHUN GONTOR PUTRI KAMPUS 7 **(2018)**
20. KETUA PANITIA PENERIMAAN CALON PELAJAR DI GONTOR PUTRI KAMPUS 7 **(2019&2021)**

#### KARYA ILMIAH

1. SKRIPSI:  
القراءة بغير اللغة العربية في الصلاة عند الإمام الشافعي و الإمام أبي حنيفة (دراسة مقارنة)
2. TESIS:  
*"Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Perkawinan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"*